

**Judul** : Wajib belajar 13 tahun, saatnya genjot mutu pendidikan  
**Tanggal** : Sabtu, 25 Oktober 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Wajib Belajar 13 Tahun Saatnya Genjot Mutu Pendidikan

ANGGOTA Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mendorong pematangan konsep dan skema pembiayaan dalam wacana penerapan wajib belajar 13 tahun. Saat ini, wacana tersebut tengah dibahas dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Fikri menyebut, penambahan masa wajib belajar harus diikuti dengan perencanaan yang matang, terutama dari sisi kurikulum, kelembagaan, dan anggaran pendidikan. Agar, kebijakan ini tidak sekadar menambah satu tahun dari jenjang PAUD tanpa kesiapan konsep dan pendanaan yang jelas.

"Kita ingin mendalami dan mengidentifikasi model, strategi implementasi, serta implikasi pembiayaan dari perluasan wajib belajar menjadi 13 tahun ini," ujar Fikri dalam diskusi bertajuk "Wajib Belajar 13 Tahun dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional: Analisis Konsep dan Implikasi Pembiayaan" di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Fikri juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara RUU Sis-

diknas dengan berbagai regulasi pendidikan lainnya, seperti UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi, serta UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Revisi ini harus mampu mengintegrasikan seluruh sistem pendidikan tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

"Ada kaitan erat dengan UU Pemerintahan Daerah, UU ASN, dan UU Pesantren. Semua harus disinkronkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan kebijakan," jelas politikus Fraksi PKS itu.

Dia juga mengingatkan agar proses penyusunan RUU Sisdiknas tidak dilakukan secara terburu-buru dengan pendekatan omnibus law. Langkah tersebut justru berpotensi melemahkan substansi dan implementasi kebijakan. "Kalau terburu-buru, UU yang baru disahkan bisa langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ini jangan sampai terulang dalam revisi Sisdiknas," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati menamb-

hajar 13 tahun harus diiringi pembenahan kurikulum dan peningkatan mutu pembelajaran. Esensi kebijakan ini bukan sekadar memperpanjang masa belajar dari PAUD ke SMA.

"Wajib belajar 13 tahun harus memastikan anak-anak bangsa tumbuh dengan fondasi iman dan takwa, penguasaan ilmu, serta kesiapan menghadapi tantangan global," ungkap politisi PKS ini.

Kurniasih menilai, pembahasan kurikulum dalam revisi Sisdiknas menjadi kunci agar program wajib belajar 13 tahun tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan mutu pendidikan di setiap jenjang. Pembahasan RUU Sisdiknas akan berpijak pada prinsip keadilan, inklusivitas, dan peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya kajian mendalam terhadap implikasi pembiayaan kebijakan wajib belajar, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah sejumlah mekanisme alokasi anggaran pendidikan. ■ PYB